

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya usaha perusahaan menambah beban manajemen di dalam mengendalikan kegiatan yang semakin meluas sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan rutin, meluasnya daerah usaha serta desentralisasi organisasi. Sejalan dengan ini maka beberapa wewenang dan tanggungjawab manajemen didelegasikan ke beberapa orang. Dari semakin meluasnya wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan, manajemen mulai merasa perlu adanya bagian khusus yang harus melakukan tugas pengawasan atas keseluruhan jaringan kegiatan perusahaan, yaitu pemeriksa internal control.

Bagian ini harus bisa membuat suatu program yang sistematis mengenai pengamatan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan dan hasil kegiatan untuk menemukan apakah wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan telah dilaksanakan secara tepat, dan apakah kebijaksanaan serta prosedur telah dilaksanakan seperti yang sudah ditetapkan.

Perkembangan dan kemajuan perbankan di Indonesia saat ini menuntut perbankan berkompetisi untuk bersaing dengan produk-produk dan jasa maupun layanan perbankan dengan fitur-fitur yang menarik serta modern

dalam memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi dan aktivitas perbankan bagi nasabah.

Dalam menjalankan usaha perbankan sangat membutuhkan keseimbangan aspek pengendalian intern yang harus diterapkan dengan baik agar resiko operasional bank dapat diminimalisir. Lemahnya penerapan aspek pengendalian intern dalam operasional akan memperbesar kemungkinan munculnya berbagai resiko yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal baik secara perorangan atau kelompok maupun adanya kerjasama yang berkeinginan melakukan pembobolan bank untuk keuntungan pribadi.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam industri jasa keuangan perbankan di samping memiliki bermacam-macam produk dan jasa juga memberikan pelayanan yang memuaskan secara berkesinambungan kepada Nasabah.

Hal ini terbukti dengan dibentuknya unit-unit bidang audit, manajemen resiko, kepatuhan dan internal control untuk melakukan evaluasi terhadap operasional yang disesuaikan dengan Standard Operasional Prosedur (SOP), *Job Desk* dan ketentuan lainnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang telah dipercayakan manajemen.

Hal tersebut dapat terjadi bila minimnya aspek pengendalian intern serta evaluasi dan juga monitoring dari pimpinan perusahaan. Ini dapat